

PROCEEDING FESTIVAL RISET AKUNTANSI

Padu Rupa Riset Akuntansi dan Seni

19 OKTOBER 2017

**Puri Kencono Ballroom Hotel
Lorin Solo**



ARRA²⁰¹⁷
FESTIVAL RISET AKUNTANSI

Digital Repository Universitas Jember



KOMISARIAT SURAKARTA
WILAYAH JAWA TENGAH



WILAYAH JAWA TENGAH



KAPd JATENG



KAPd

JADWAL CALL FOR PAPER FRA JATENG 2017

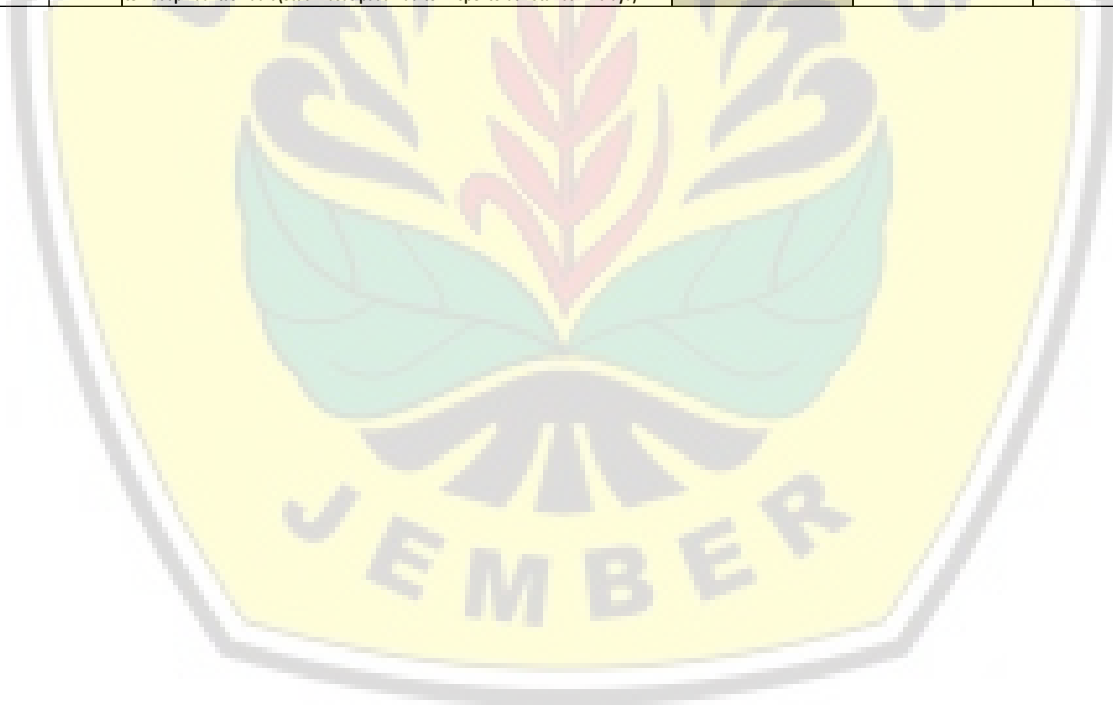
KAMIS, 19 OKTOBER 2017

WAKTU	NO PAPER	JUDUL PAPER	NAMA PEMAKALAH	INSTANSI	MODERATOR/PEMBAHAS
SESI 1: PURI RUKMI					
10.15-10.35	2	Balanced Scorecard: Alat Ukur Kinerja Desa Waringin Jaya dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	Novita	Universitas Trilogi Jakarta	Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.
10.35-10.55	27	Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Kompleksitas terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah	Pancawati Hardiningsih, Ceacilia Srimindarti, Rachmawati Meita Oktaviani	Universitas Stikubank	
10.55-11.15	51	Problematika Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Janti Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)	Lilik Purwanti	Universitas Brawijaya	
11.15-11.35	90	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Vivi Adeyani Tandean, Novitasari		
11.35-11.55	3	Nilai Kearifan Lokal, Moral dan Etika dalam Potensi Whistleblowing Pengelolaan Dana Desa	Katarina Dwi Utami, Intiyas Utami, Aprina Nugrahesty	Universitas Kristen Satya Wacana	
SESI 2: PURI RUKMI					
13.00-13.20	103	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dan Niat Melaporkan Kecurangan	Immanuel Nataniel Makanuai, Margarith Wambukomo	Universitas Kristen Satya Wacana	Dr. Theresia Woro Damayanti, M.Si., Ak.
13.20-13.40	34	Efektivitas dan Strategi Pemanfaatan Dana Desa secara Intensif melalui BUMDes berbasis Doperman (Studi Kasus Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)	Aryo Prakoso, Sonya Nurcahya Paramita, Mariya Ulfa	Universitas Jember	
13.40-14.00	35	Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan	Jouzar Farouq Ishak	Universitas Widyatama	
14.00-14.20	38	Implementasi Penerapan Pencatatan Akuntansi berbasis SAK-ETAP pada UMKM Batik Desa Bengle Tegal	Novita Diah Swastiningrum, Riana Sitawati	STIE Dharmaputra Semarang	
SESI 2: PURI RETNO					
13.00-13.20	79	Disharmonisasi Penerapan APBDesa dalam UU Nomor 6 tahun 2014	Indra Agung Wilopo, Kusumaningdiah Retno Setiorini	Universitas Alma Ata	Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, M.Si., Ak., CA
13.20-13.40	98	Analisis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan dan Sumatera	Dinar Nuraini, Meka Sabilla Salim, Djoko Suhardjanto	Universitas Sebelas Maret	
13.40-14.00	105	Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebuah Refleksi Indonesia dari Aceh	Mirna Indriani, Safrida Putri, Nadirsyah	Universitas Syiah Kuala	
14.00-14.20	91	Best Practice Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Gelangsar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)	Hardiyanti Tri Ratnasari, Sri Pancawati Martiningsih	Universitas Bunda Mulia Jakarta	
14.20-14.40	81	Bantuan Sosial dan Kemiskinan: Studi Kasus Anggaran Bansos Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011	Mesakh Yolando, Marwata	Universitas Kristen Satya Wacana	
SESI 3: PURI RETNO					
15.30-15.50	82	Belanja Bantuan Sosial dan Kemiskinan (Studi atas Anggaran Bansos Pemprov di Indonesia 2008-2011)	Alif Amirul Wicaksana, Marwata	Universitas Kristen Satya Wacana	Dian Kurniasari, SE, M.Si., Ak.
15.50-16.10	99	Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015	Rahajeng Putri Andini, Metha Wahyu Rahmatika, Djoko Suhardjanto	Universitas Sebelas Maret	
16.10-16.30	33	Dampak Desentralisasi Fiskal Dan Faktor Lain Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia	Siti Arifah, Nuwun Priyono	Universitas Tidar	
16.30-16.50	107	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara	Achmad Ngirfan	Universitas Gadjah Mada	

JADWAL CALL FOR PAPER FRA JATENG 2017

KAMIS, 19 OKTOBER 2017

WAKTU	NO PAPER	JUDUL PAPER	NAMA PEMAKALAH	INSTANSI	MODERATOR/PEMBAHAS
SESI 1: PURI RETNO					
10.15-10.35	22	Dilema Etis Profesi Auditor melakukan Praktik Penghentian Prematur atas Proses Audit	Muhyiddin	Universitas Esa Unggul	Dr. Intiyas Utami, SE., M.Si., Ak., CMA., QIA
10.35-10.55	28	Pengaruh Personality Auditor, Burnout dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Internal Auditor (Studi pada Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah)	Rahmawati, Made Wedyaswari	Universitas Sebelas Maret	
10.55-11.15	36	Pengaruh Independensi, Keahlian dan Pengalaman Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit atas LKPD Provinsi Sumatera Utara	Eka Nurmalasari, Wirda Zahrina Saragih	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
11.15-11.35	60	Analysis of Downward Auditor Switching by Big Four Audited Companies: A Study of ASEAN	Totok Budisantoso, Rahmawati, Bandi, Agung Nur Probohudono	Universitas Atmajaya Yogyakarta	
11.35-11.55	37	Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kinerja Perusahaan dengan Perspektif Sustainable Balanced Scorecard	Hemas Wulan	STIE Dharmaputra Semarang	
SESI 2: ARCADE					
13.00-13.15	40	Analysis of Technology Readiness and User Acceptance in Village Financial System (Siskeudes)	Ayatollah Michael Musyaffi, Arinal Muna, Nelia Fariani Siregar	Universitas Swadaya Gunung Jati	Yulita Setiawanta, M.Si., Ak., CA., CPA
13.30-13.45	69	Sistem Akuntansi berbasis Microsoft Access: Pendekatan Pengajaran Sistem Akuntansi	Luciana Spica Amalia	STIE Perbanas Surabaya	
13.45-14.00	73	Kontribusi GCG untuk Mengurangi Terjadinya Audit Delay	Gustita Arnawati	Universitas Veteran Bangun Nusantara	
14.00-14.15	89	Pengaruh Independensi, Objektivitas, Kompetensi dan Kecermatan Profesional terhadap Kualitas Audit Intern	Dewi Amalia, Raja Yulianita Sarazwati	Universitas Ahmad Dahlan	
14.15-14.30	94	Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional Auditor dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor Inspektorat Kota Tasikmalaya)	Jajang Badruzaman	Universitas Siliwangi	



JADWAL CALL FOR PAPER FRA JATENG 2017

KAMIS, 19 OKTOBER 2017

WAKTU	NO PAPER	JUDUL PAPER	NAMA PEMAKALAH	INSTANSI	MODERATOR/PEMBAHAS
SESI 1: ARCADE					
10.15-10.30	23	Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi	Sri Wahjuni Latifah, Muhammad Budi Luhur	Universitas Muhammadiyah Malang	Dr. Dien Noviany Rahmatika, MM., Ak.
10.30-10.45	31	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Manajemen Laba dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi	Carolyn Lukita Sembiring	STIE Perbanas Surabaya	
10.45-11.00	46	Analisis Penerapan Green Accounting pada Industri Batik Laweyan	Desy Nur Pratiwi, Yuwita Ariessa Pravasanti	STIE AAS Surakarta	
11.00-11.15	58	PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP GOOD PUBLIC GOVERNANCE DALAM MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN	Ratih Andaningsih		
11.15-11.30	92	PENGARUH KINERJA KEUANGAN, <i>MEDIA EXPOSURE</i> TERHADAP <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE</i> (PROPER 2011-2015 PERTAMBANGAN)	Ita Noviana, Riana Sitawati, Sam'ani		
11.30-11.45	102	APAKAH MANAJEMEN LABA MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA CSR DAN KINERJA KEUANGAN	Sri Ruwanti	Universitas Maritim Raja Ali Haji	



JADWAL CALL FOR PAPER FRA JATENG 2017					
KAMIS, 19 OKTOBER 2017					
WAKTU	NO PAPER	JUDUL PAPER	NAMA PEMAKALAH	INSTANSI	MODERATOR/PEMBAHAS
SESI 1: PIKE 2					
10.15-10.35	29	PENGARUH <i>RETURN ON EQUITY</i> , UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO KEUANGAN, NET PROFIT MARGIN, TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING)	Waode Hanny Masyithah, Djoko Sigit Sayogo, Adi Prasetyo	Universitas Muhammadiyah Malang	Dr. Deliana, M.Si., Ak.
10.35-10.55	59	FAKTOR PEMODERASI HUBUNGAN PARTISIPASI ANGGARAN DAN KINERJA MANAJERIAL	Abriyani Puspaningsih, Andre Prasetyanto Nugroho	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	
10.55-11.15	32	ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK AUDITOR DAN <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> TERHADAP <i>PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK KONSTRUKSI, PROPERTI, INDONESIA TAHUN 2013-2016)</i>	Rahmawati, Yovinta Kinanti Kumarahadi	Universitas Sebelas Maret	
11.15-11.35	42	PENGARUH CSR, GCG, INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE DI INDONESIA	Dian Pitawati, Riana Rachmawati Dewi	Universitas Islam Batik Surakarta	
11.35-11.55	43	Mencapai <i>Financial Well-being</i> melalui Peran <i>Financial literacy</i> bagi Masyarakat Indonesia	Raymond Wahyudi	Universitas Kristen Petra	
SESI 2: PIKE 3					
13.00-13.20	48	Kualitas Laporan Keuangan, Asimetri Informasi dan Efisiensi Investasi	Indah Umiyati	STIE Sutaatmadja	Dr. Deliana, M.Si., Ak.
13.20-13.40	61	Nilai Perusahaan Berdasarkan Accounting dan Market Performance	Retno Widiastuti, Anna Isrowiyah, Hesti Wahyuni	Politeknik Negeri Malang	
13.40-14.00	106	EARNINGS PERSISTENCE DAN FENOMENA STOCK RETURN VOLATILITY DI BURSA EFEK INDONESIA	Ign. Novie Endi Nugroho, Rahmawati	Universitas Sebelas Maret	
14.00-14.20	30	PENGARUH RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN	Sri Wahjuni Latifah, Dhaniel Syam, Rinta Feri Rosita	Universitas Muhammadiyah Malang	
SESI 3: PIKE 2					
15.30-15.50	62	BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL: KINERJA KEUANGAN BERBASIS RASIO KEUANGAN	Anita Wijayanti	Universitas Islam Batik Surakarta	Dr. Grace Tianna Solovida, SE., M.Si., Ak.
15.50-16.10	68	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Tipe Auditor Terhadap Kinerja Keuangan di Pasar Modal	Ready Wicaksono, Dasriyan Saputra	STIE Balikpapan	
16.10-16.30	71	Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Fopy Angraini, Deliana, Abdul Rahman	Politeknik Negeri Medan	
16.30-16.50	77	PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI	Astri Rizalina, Eli Safrida, Deliana, Sri Mahyuni	Politeknik Negeri Medan	
SESI 3: PIKE 3					
15.30-15.50	86	PENGARUH RASIO UTANG, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, ASET JAMINAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN TANG TERDAFTAR DI BEI	Henidar Situmorang, Selfi Afriani Gultom, Muhammad Zuardi, Deliana	Politeknik Negeri Medan	Atiq Amjadallah Alfie, SE., M.Si., Ak.
15.50-16.10	95	PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015)	Dita Anggun Kinasih, Edy Supriyono	STIE Bank BPD Jateng	
16.10-16.30	96	Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan <i>e-commerce</i> untuk peningkatan keunggulan kompetitif pada UKM Batik	Arum Ardianingsih	Universitas Pekalongan	
16.30-16.50	97	ANALISIS STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS <i>VOLUNTARY DISCLOSURE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2014-2016)</i>	Dessy Widya Astuti, Rini Fatmawati	Universitas Sebelas Maret	

Digital Repository Universitas Jember

JADWAL CALL FOR PAPER FRA JATENG 2017

KAMIS, 19 OKTOBER 2017

WAKTU	NO PAPER	JUDUL PAPER	NAMA PEMAKALAH	INSTANSI	REVIEWER
SESI 1: PIKE 3					
10.15-10.35	8	Ada Apa Setelah Tax Amnesty? (Studi Literatur Perspektif: Wajib Pajak)	Antin Okfitasari, Titik Setyaningsih, Ety Meikhati	STMIK Duta Bangsa Surakarta	Puji Harto, SE., M.Si., Ph.D
10.35-10.55	9	FORMALITAS FIQH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ALIRAN PRAGMATIS	Chaidir Iswanaji		
10.55-11.15	25	Konstruksi Model Kurikulum Akuntansi berbasis Budaya	Tri Handayani Amaliah, Amir Lukum		
11.15-11.35	53	IMPLEMENTASI <i>WHISTLEBLOWING</i> SISTEM DALAM MENGURANGI <i>FRAUD</i> AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Nashirotn Nisa Nurharjanati	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
11.35-11.55	72	IMPLEMENTASI PSAK NO. 23 TERHADAP PENGAKUAN PENDAPATAN JASA PADA INDUSTRI PERHOTELAN DAN PENGARUH KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi Kasus pada Hotel GMP di Malang)	Muh Hasyim Ashari	STIE Indocakti Malang	
SESI 2: PIKE 2					
13.00-13.20	74	Apakah Metode Mind Mapping Efektif sebagai Alat Pembelajaran Perpajakan?	Emi Rahmawati, Adi Darmawan Ervanto	Universitas Trunojoyo Madura	Dr. Edy Supriyono, M.Si., Ak.
13.20-13.40	75	PENGARUH <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> , UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN <i>CAPITAL INTENSITY</i> TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK	Nur Widi Astuti, Dien Noviany Rahmatika, Dewi Indriasih	Universitas Pancasakti Tegal	
13.40-14.00	76	DAMPAK STRES KERJA TERHADAP PERILAKU AUDIT DISFUNGSIONAL	Anna Isrowiyah	Politeknik Negeri Malang	
14.00-14.20	78	PENGARUH <i>RETURN ON ASSET</i> , <i>LEVERAGE</i> , UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSI TERHADAP TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)	Ade Adriani, Norlena, Ina Andriani	Universitas Lambung Mangkurat	
SESI 3: PIKE 3					
15.30-15.50	80	TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA	Ade Lisa Matasik, Adonia Dwi Lestari, Theresia Woro Damayanti	Universitas Kristen Satya Wacana	Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA
15.50-16.10	85	PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR MENDETEKSI KECURANGAN	Khomsiyah, Jetri Wilson, Susi Dwi Mulyani	Universitas Trisakti	
16.10-16.30	87	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta	Umi Sulistiyanti, Muhammad Mukhtar Fauzy	Universitas Islam Indonesia	
16.30-16.50	104	PENGARUH <i>ATTITUDE TOWARD BEHAVIOR</i> , <i>SUBJECTIVE NORM</i> , <i>PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL</i> PADA <i>INTENTION WHISTLEBLOWING</i>	Choirul Anam		

**EFEKTIFITAS DAN STRATEGI PEMANFAATAN DANA DESA
SECARA INTENSIF MELALUI BUMDES BERBASIS
DOPERMAN
(STUDI KASUS DESA BLABAKAN KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR)**

Aryo Prakoso

Universitas Jember
aryo.fisip@unej.ac.id

Sonya Nurcahya Paramita

Universitas Jember

Mariya Ulfa

Universitas Jember

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi. Semangat menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah dengan semangat pemerataan pembangunan melalui pembangunan yang dimulai dari desa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Otonomi daerah terdapat Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Desentralisasi tersebut pemerintah pusat memberikan anggaran dari APBN berupa Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 2015 menerima total Dana Desa sebesar Rp 2.214.014.855.000,-. Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi tereselenggaranya good governance. Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan potensi daerahnya melalui optimalisasi Dana Desa (DD). Pada Tahun 2015 tercatat jumlah DD di Kabupaten Madiun sebesar Rp.15.000.898.000 yang diterima oleh 198 desa dan 15 kecamatan. Desa Blabakan menjadi salah satu desa di Kecamatan Mejayan yang turut menerima DD dari kabupaten/kota Madiun. Berdasarkan data dari kelurahan Desa Blabakan Pada tahun

EFEKTIFITAS DAN STRATEGI PEMANFAATAN DANA DESA SECARA INTENSIF MELALUI BUMDES BERBASIS DOPERMAN (Studi Kasus Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Jawa Timur)

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi. Semangat menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah dengan semangat pemerataan pembangunan melalui pembangunan yang dimulai dari desa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Otonomi daerah terdapat Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Desentralisasi tersebut pemerintah pusat memberikan anggaran dari APBN berupa Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 2015 menerima total Dana Desa sebesar Rp 2.214.014.855.000,- . Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi tereselenggaranya *good governance*. Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan potensi daerahnya melalui optimalisasi Dana Desa (DD). Pada Tahun 2015 tercatat jumlah DD di Kabupaten Madiun sebesar Rp.15.000.898.000 yang diterima oleh 198 desa dan 15 kecamatan. Desa Blabakan menjadi salah satu desa di Kecamatan Mejayan yang turut menerima DD dari kabupaten/kota Madiun. Berdasarkan data dari kelurahan Desa Blabakan Pada tahun 2016 memperoleh DD sebesar Rp.608.792.000. Dana desa tersebut dialokasikan untuk Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui alokasi dana desa tersebut, tersebut penulis tertarik untuk mengukur bagaimanakah efektifitas Dana Desa dalam perekonomian Desa Blabakan dan bagaimanakah strategi pengembangan perekonomian desa Blabakan melalui intensif Dana Desa.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan Desa Blabakan Kabupaten Madiun sebagai unit analisis, sedangkan unit observasi adalah Dana Desa Blabakan dan kondisi masyarakat Desa Blabakan. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur, data dianalisis secara kuantitatif diskriptif untuk menguji kebenaran hasil penggunaan Dana Desa dan kondisi masyarakat Desa Blabakan. Selain itu, data penulis menggunakan beberapa informasi yang diberikan oleh pihak kelurahan Desa Blabakan dalam bentuk hardcopy tentang desa Blabakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun 2016 sebesar 89,36% Dana Desa tersebut digunakan dalam Bidang Pembangunan. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa belum optimal diberbagai bidang lainnya terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa di Desa Blabakan dilihat belum memberikan dampak yang signifikan karena lebih terfokus pada bidang pembangunan saja, sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat

hanya berupa pembelanjaan kegiatan PKK. Dari sisi perekonomian, Desa Blabakan memiliki potensi sumber daya baik SDM maupun SDA yang potensial untuk dikembangkan guna mendongkrak perekonomian. Hasil analisa potensi yang dimiliki, maka penulis berinisiatif memberikan resolusi alternatif berupa pendirian BUMDesa dengan produk unggulan gula cair rendah kalori berbasis *deferensiation of Porter's management*. Desa Blabakan dapat dikatakan mampu untuk menjadi sebuah desa maju dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki berupa hasil panen singkong dan dapat dikembangkan melalui pendirian BUMDes tersebut. Sebaiknya, pihak pemerintah terutama para aparatur desa memberikan alokasi tersendiri penggunaan Dana Desa untuk membantu inisiasi pendirian BUMDes ini sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Kata Kunci: Dana Desa, Deferensiasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah untuk mempermudah pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada bab 1 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Otonomi daerah terdapat Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Desentralisasi tersebut pemerintah pusat memberikan anggaran dari APBN berupa Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Bab X Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat¹. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.² Hasil transfer yang di terima oleh setiap daerah di Indonesia harus dikelola sesuai dengan peraturan

¹ Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

² Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara

pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, salah satunya Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia pada tahun 2015 menerima total Dana Desa sebesar Rp 2.214.014.855.000,-, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 3.439.282.534.000 dan Dana Bagi Hasil PDRB sebesar Rp 378.673.842.000 dengan jumlah desa sebanyak 7.723 desa. Berdasarkan data tersebut setiap desa di Jawa Timur memperoleh bagian Dana Desa rata-rata sebesar Rp 781.040.000. (Kementerian Keuangan RI, 2016).³

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, Jawa Timur merupakan daerah yang memperoleh Dana Desa terbesar pertama dari seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah sebesar Rp 2.214.014.855.000. ⁴ Dana Desa tersebut disalurkan ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi tereselenggaranya *good governance*. Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan potensi daerahnya melalui optimalisasi Dana Desa. Pada Tahun 2015 tercatat jumlah DD di Kabupaten Madiun sebesar Rp55.287.810.000 yang diterima oleh 198 desa dan 15 kecamatan. ⁵ Desa Blabakan menjadi salah satu desa yang turut menerima DD dari kabupaten/kota Madiun. Berdasarkan data dari keluarahan Desa Blabakan Pada tahun 2016 memperoleh DD sebesar Rp.608.792.000, jumlah ADD sebesar Rp 423.450.000 serta Bagi Hasil PDRB sebesar Rp 7.754.000. Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud selain itu juga Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan. Dana desa dengan semangat membangun Indonesia yang dimulai dari desa, alokasi penggunaan anggaran tersebut, menarik untuk dikaji bagaimanakah desa mengelola dana desa tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Dana Desa dalam pengembangan perekonomian Desa Blabakan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana alternatif model strategi pengembangan perekonomian desa Blabakan melalui intensifikasi Dana Desa ?

³ Data dikutip dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>; 30 April 2017; 10:56

⁴ Data dikutip dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>; 30 April 2017; 10:56

⁵ Data dikutip dari <http://harianbhirawa.co.id/2015/06/pemkab-madiun-serahkan-add-dd-31-desa-rp902-m/>; 3 Mei 2017; 20:38

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk menganalisis efektifitas Dana Desa dalam pengembangan perekonomian Desa Blabakan
2. Untuk memberikan sebuah alternatif model strategi pengembangan perekonomian desa Blabakan melalui intensifikasi Dana Desa

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada bab 1 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Otonomi daerah terdapat asas otonomi yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas-asas tersebut adalah desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Desentralisasi tersebut pemerintah pusat memberikan anggaran dari APBN berupa Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi yang di transfer melalui APBD kabupaten dan kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang di peroleh dari bagi hasil dana pajak dan dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang di terima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18

bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain. Pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, meliputi, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan peminjaman.

Selanjutnya menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan, berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membisakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan BUMDes diperlukan sebuah strategi terutama dalam hal manajemennya.

Strategi Bersaing Generik

Strategi Generik merupakan sebuah pendekatan untuk mengungguli pesaing dalam industri dalam struktur industri tertentu ini berarti bahwa semua perusahaan dapat

memperoleh hasil laba yang tinggi. Strategi Generik terdiri dari tiga pendekatan yaitu keunggulan biaya menyeluruh, differensiasi, dan fokus. Strategi keunggulan biaya menyeluruh merupakan strategi mencapai keunggulan biaya menyeluruh dalam industri melalui seperangkat kebijakan fungsional yang ditujukan kepada sasaran pokok. Strategi generik differensiasi adalah mendefrensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu menciptakan sesuatu baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Pendek kata untuk melakukan deferensiasi dapat bermacam-macam bentuknya yaitu citra rancanga atau merk, teknologi, karakteristik khusus, pelayanan pelanggan atau dimensi-dimensi lainnya. Direfensiasi, jika tercapai, merupakan strategi yang baik untuk menghasilkan laba di atas rata-rata dalam suatu industri kerana strategi ini menciptakan posisi yang aman untuk mengatasi kekuatan persaingan, meskipun dengan cara yang berbeda dari strategi keunggulan biaya. Diferensiasi memberikan penyekat terhadap persaingan kerana adanya loyalitas merek dari pelanggan dan mengakibatkan berkurangnya kepekaan terhadap harga. Diferensiasi juga meningkatkan margin laba yang menghadirkan kebutuhan akan posisi biaya rendah. Diferensiasi menghasilkan margin yang lebih tingi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kekuatan pemasok, dan jelas mengurangi kekuatan pembeli, karena pembeli tidak mempunyai alternatif yang dapat dibandingkan sehingga menjadi kurang peka terhadap harga. Perusahaan akan mencapai deferensiasi karena mampu memenuhi kebutuhan target tertentu dengan lebih baik, atau mencapai biaya yang lebih rendah dalam melayani targetnya, atau bahkan mencapai kedua-duanya. Perusahaan yang memilih stategi fokus secara potensial juga dapat menghasilkan laba diatas rata-rata untuk industrinya. Strategi fokus berarti bahwa perusahaan mempunyai posisi biaya rendah dengan target stateginya,direfensiasai atau kedua-duanya.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari pembahasanya, karya tulis ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif karena berupaya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa secara apa adanya. Target dari penelitian ini adalah keuangan pemerintahan desa Blabakan, dengan unit analisis Dana desa. Teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi (Pengamatan Langsung), merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi karena pengamat melibatkan diri kedalam objek pengamatan. Adapun Jenis data yang dipakai terdiri dari Data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer tersebut langsung dari pihak kelurahan, masyarakat dan petani Desa Blabakan, sebaliknya data sekunder berupa data dari Kantor Desa Blabakan yaitu

berupa data anggaran dana alokasi desa, jumlah penduduk, potensi daerah dan data-data lain yang mendukung. Sedangkan untuk Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Dana Desa dalam Perekonomian Desa

Desa Blabakan merupakan salah satu desa di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Jawa Timur yang menerima Dana Desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk beberapa bidang kegiatan, antarlain kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Desa Blabakan menerima Dana Desa pertama pada tahun 2016 sebesar Rp.608.792.000. Penggunaan Dana Desa tersebut untuk beberapa bidang. Berikut ini Laporan Rekapitulasi Realisasi Dana Desa Blabakan pada tahun 2016.

Tabel 1.1 laporan Rekapitulasi Realisasi Dana Desa(DD) Desa blabakan kecamatan mejayan kabupaten madiun tahun 2016 tahap I

No	Nomor/ Tgl APBDES	Jumlah DD dalam 1 Tahun	Realisasi Tahap I (Rp)	Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Anggaran
1	7 Tahun 2016	608,792,000	365,275,200		362,275,200
	20 Januari 2016			Bidang Pembangunan	
				Pembangunan Drainase RT.01	12,475,200
				Pembangunan Drainase RT.03	70,000,000
				Pembangunan Drainase RT.05	70,000,000
				Pembangunan Drainase RT.06	75,000,000
				Pembangunan Drainase RT.07	75,000,000
				Pembangunan Kanopi Makan	44,000,000
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
				Belanja Kegiatan Pemberdayaan PKK	18,800,000
Jumlah					365,275,200
Sisa					243,516,800

Tabel 1.2 laporan rekapitulasi realisasi Dana Desa (DD)

Desa blabakan kecamatan mejayan kabupaten madiun tahun 2016 tahap II

Nomor/ Tanggal APBDES	Jumlah DD dalam 1 Tahun	Realisasi Pencapaian Tahap II (Rp)	Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Anggaran
07 Tahun 2016	608,792,000	243,516,800		243,516,800
20 Januari 2016			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
			Pembangunan Gapura Masuk Desa	45,992,000
			Bidang Pembangunan	
			Pembangunan Drainase RT.01	57,524,800
			Pembangunan Drainase RT.02	70,000,000
			Pembangunan Drainase RT.08	70,000,000
Jumlah				243,516,800
Sisa				0

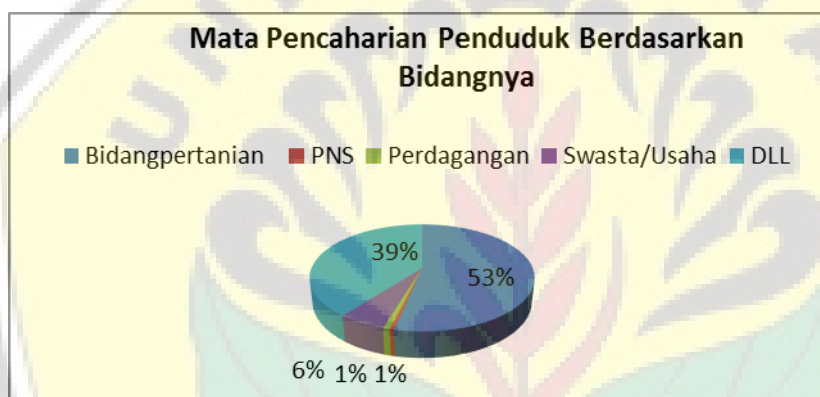
Total Dana Desa yang diterima oleh Desa Blabakan sebesar Rp.608.792.000. Penggunaan DD tersebut dibagi menjadi dua tahap. Kedua tahap tersebut direalisasikan pada tanggal 20 Januari 2016. Berdasarkan data diatas, pemanfaatan Dana Desa digunakan untuk kegiatan Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pada tahap pertama penggunaan DD sebesar Rp 365.275.200. Dana tersebut digunakan untuk bidang pembangunan sebesar Rp. 346.475.200,- dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 18.800.000 sehingga tersisa sebesar Rp 243.516.800 kemudian sisa tersebut direalisasikan pada tahun kedua. Dari dana sebesar Rp 243.516.800, sebesar Rp.197.524.800 dimanfaatkan untuk bidang pembangunan dan sisanya sebesar Rp 45.992.000 digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa pembangunan gapura. Dari Pemanfaatan DD tahap 1 dan 2 tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan Dana Desa belum seimbang, serapan dana terbesar untuk bidang Pembangunan sebanyak 89,36% dari total DD. Kegiatan bidang pembangunan terdiri dari Pembangunan Drainase, Pembangunan Talud dan Pembangunan Kanopi Makam. Kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa pembangunan gapura Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sendiri hanya berupa belanja kegiatan Pemberdayaan PKK.

Fakta menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa dalam penggunaannya sudah sesuai dengan semangat permendes 21 tahun 2015 yang mengutamakan pembangunan

infrastruktur, akan tetapi hasil ini belum menyentuh masyarakat secara penuh. Pembangunan bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih dikesampingkan dengan porsi hanya 10,64% saja. Potensi SDA dan SDM di bidang pertanian belum mampu mencapai kesejahteraan masyarakat dengan program Dana Desa tersebut melalui pemberdayaan SDA dan SDMnya.

Potensi Desa Blabakan

Desa Blabakan memiliki luas wilayah 140,46 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 94,23 Ha, luas tanah kering 27,62 Ha, luas perkebunan 12,11 Ha, dan luas tanah hutan 6,50 Ha. Menurut hasil observasi dan wawancara di Desa Blabakan bahwa Desa Blabakan memiliki potensi di bidang pertanian terutama komoditas singkong yang berlimpah, lebih dari 6,50 Ha tanah ditanami singkong sebagai mata pencaharian petani dan buruh tani di desa tersebut.



Selain itu dapat dilihat dari jumlah mata pencaharian petani dan buruh tani sebanyak 53% dari 1.876 orang yang berarti bahwa potensi sumber daya manusia di Desa Blabakan yaitu bercocok tanam di bidang pertanian. Oleh karena itu kemampuan SDM berupa keahlian menanam singkong mampu menghasilkan hasil panen singkong yang banyak dengan faktor tanah yang ada.

Dari rata-rata jumlah penduduk Blabakan yang bermata pencaharian di bidang pertanian belum mampu dikatakan menjadi pendongkrak dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat disebabkan di Desa tersebut masih terjadi berbagai permasalahan yang terjadi di bidang pertanian.

Pengelolaan Potensi Desa Blabakan

Desa Blabakan yang terkenal dengan potensi komoditas singkong dimana lahan hutan dan pertanian penduduknya di tanami singkong ternyata masih memiliki berbagai masalah. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis kepada para petani dan Kepala Desa

Blabakan yaitu potensi sumber daya manusia yang 53,3% bermatapencapaian di bidang pertanian tersebut belum mampu berjalan secara optimal dengan membiarkan permasalahan monopoli harga singkong yang masih berjalan hingga saat ini. Sumber daya manusia petani yang rata-rata hanya lulusan SD dan SMP menjadi penyebab kurangnya pengetahuan dan kreativitas petani untuk mengolah hasil pertanian mereka. Menurut Kepala Desa Blabakan Bapak Agus Prasetya pemberdayaan sumber daya manusia petani belum mampu berjalan maksimal karena terkendala oleh biaya atau modal untuk mereka mengolah produknya. Tahun 2015 yang lalu sebagian petani singkong Desa Blabakan sempat bekerjasama dengan Desa Wonorejo dengan mengolah hasil pertanian singkong mereka menjadi tepung tapioka, namun terhambat karena berbagai faktor seperti efisiensi biaya yang kurang, waktu, sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam pengolahan dan faktor lainnya. Mengutip informasi dari Kepala desa bahwa berkaitan dengan pengelolaan dana desa, perencanaan pengalokasian yaitu belum adanya pembagian alokasi Dana Desa untuk pemanfaatan yang optimal untuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang disebabkan fokus penganggaran lebih memilih pembangunan infrastruktur Desa terlebih dahulu. Padahal jika pemanfaatan dana desa ini mampu memberikan kontribusi bagi permasalahan yang ada akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat apabila dana desa tersebut nantinya berhenti atau berkurang. Strategi yang dapat diusulkan adalah dengan membagi porsi anggaran belanja desa melalui dana desa ke empat bidang, antarlain bidang penyelenggaraan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, serta bidang pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai prosedur, menyerap aspirasi masyarakat, tidak hanya menyentuh pembangunan fisik saja, tetapi penting untuk membangun skill dan mental masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan contoh beberapa kegiatan memprakarsai pelatihan dan praktek kepada para petani

BUMDes Berbasis *Deferensiation of Porter's Management*

Dari permasalahan diatas peneliti mencoba untuk memberikan sebuah resolusi model alternatif pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan petani dan buruh tani melalui strategi pendirian BUMDes berbasis *deferensiation of Porter's management*.

a. Badan Usaha Milik Desa

BUMDes menurut penjelasan Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah adalah pemnberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Selanjutnya BUMDes menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat dan tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak ketiga, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, melalui pihak ketiga. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c) Oprasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*lokas wisdom*);
- d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e) Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f) Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- g) Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama Pemdes, BPD, anggota.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2017)

Pengelolaan BUMDes memerlukan sebuah strategi agar memberikan hasil yang lebih optimal guna peningkatan pertumbuhan Desa Blabakan. Bentuk dari strategi itu sendiri terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu strategi manajemen. Penulis memiliki inisiatif untuk menerapkan sebuah strategi bersaing generik Porter.

Strategi Generik Bersaing

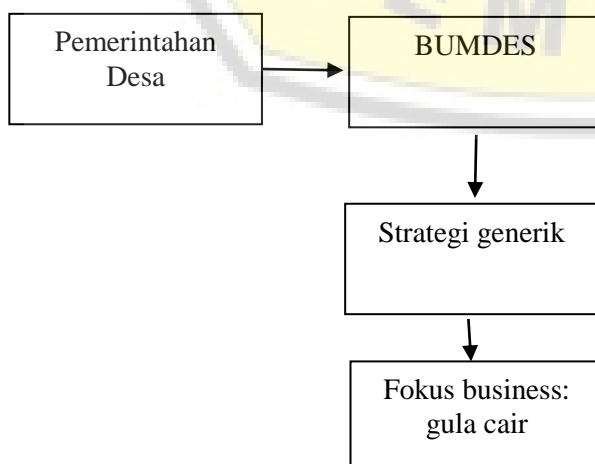
Porter's Management merupakan salah satu bentuk manajemen perusahaan berupa Strategi bersaing generik yang dicetuskan Porter. Strategi Generik merupakan sebuah pendekatan untuk mengungguli pesaing dalam industri; dalam struktur industri tertentu ini berarti bahwa semua perusahaan dapat memperoleh hasil laba yang tinggi, sedangkan di industri yang lain,

keberhasilan dengan salah satu strategi mungkin diperlukan sekadar untuk mendapatkan hasil laba yang layak dalam arti absolute. Strategi Generik terdiri dari tiga pendekatan yaitu keunggulan biaya menyeluruh, differensiasi, dan fokus. Hasil pengamatan dilapangan, peneliti mencoba memberikan model pengembangan untuk menerapkan *Porter's Management* berupa pendekatan differensiasi. Dimana Strategi generik differensiasi adalah mendefrensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu menciptakan sesuatu baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Inisiatif untuk menerapkan manajemen ini melalui pendekatan model differensiasi produk unik berupa pembuatan produk gula cair rendah kalori yang belum ramai dipasaran. Dengan adanya potensi pertanian yang lebih dari 50%, dan melimpahnya tanaman singkong, sangat penting untuk mendefrensiasikan hasil sumberdaya alam yang melimpah tersebut. Pada umumnya singkong diolah untuk pembuatan tepung tapioka atau makanan berupa keripik saja. Maka disitu letak differensiasi produk yang dihasilkan dari singkong tersebut. Gula cair ini dapat digunakan untuk penderita diabetes yang menginginkan minuman manis. Selain itu, kandungan lemak gula cair dari kulit singkong ini lebih rendah dibandingkan dengan gula kelapa sehingga dapat menjadi alternatif penggunaan gula selain gula kelapa. Gula cair dari kulit singkong cocok digunakan untuk diet karena kandungan kalornya yang rendah yaitu 106kkal/100mg sedangkan gula pasir memiliki kandungan 364kkal/100mg.

Pasar dari produk ini ditujukan untuk masyarakat umum khususnya bagi penderita diabetes melalui pemasaran pada toko oleh-oleh khas Madiun dan swalayan baik yang berada di Madiun dan seluruh nusantara dengan bermitra dengan toko toko retail berjaringan yang memiliki banyak cabang diseluruh nusantara.

Gambar 1

Model pengembangan perekonomian desa Blabakan :



Langkah langkah strategi awal pengembangan yang diusulkan terdiri dari :

1. Inisiasi pengembangan perekonomian desa Blabakan melalui strategi Model pengembangan perekonomian berbasis *defferensiasi Porter*, pemerintahan desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa, bersama-sama menginisiasi membentuk Badan Usaha Milik desa, dengan semangat bisnis untuk mewadahi dan mengakomodasikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia didesa setempat. selanjutnya, menunjuk ataupun memilih karyawan yang dipercaya untuk menjalankan lembaga tersebut.
2. Langkah kedua adalah dengan menentukan strategi bisnis yang akan dijalankan. Strategi bisnis yang akan dijalankan dengan memakai strategi *differensiasi poterter*, yaitu dengan mewadahi kegiatan prioritas yang unik dan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia desa setempat, yang dipilih adalah pengembangan singkong
3. Langkah selanjutnya adalah fokus kegiatan, yaitu pengembangan singkong melalui pembuatan gula dari kulit singkong.

Pengelolaan dana desa dengan perencanaan yang matang, pengalokasian bidang infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan proporsional, inisiasi pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Strategi deferensiasi Porter dengan pendirian Bumdes di desa Blabakan dengan inti atau *pilot project* usaha gula cair, diharapkan dapat mewadahi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di desa setempat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta data-data dari pihak Kantor Desa, efektifitas Dana Desa di Desa Blabakan dialokasikan dengan prioritas pembangunan infrastruktur.
2. Resolusi alternatif berupa model strategi pemanfaatan Dana Desa secara intensif yaitu melalui BUMDes berbasis Strategi Generik Bersaing. Dalam deffrensiansi ini berinisiatif untuk membuat produk unggulan gula cair rendah kalori. Strategi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik petani maupun kas keuangan desa.

Saran

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta dinas-dinas yang berkaitan mendukung program Pembangunan Desa, selain berfokus pembangunan infrastruktur, sangat penting juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi sumber daya alam yang ada dengan memberikan bantuan alat produksi, pelatihan-pelatihan bagi para petani serta menyediakan pasar bagi hasil produk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Porter, M. E. 2004. *Strategi Bersaing-Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*:Erlangga.Jakarta.
- Azwar D. dan R. Erwanti. 2000. Pembuatan Sirup Glukosa Dari Kimpul (*Xanthosoma violaceum schott*) Dengan Hidrolisa Enzimatis. Jurusan Teknik Kimia, Fak. Teknik, Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa pada Pasal 18.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>; Diakses pada 30 April 2017; 10:56
- http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/uu_nomor_17_tahun_2012.pdf; Diakses pada 18 April 2017;17:24
- <http://www.depokpos.com/arsip/2017/03/gula-cair-dari-limbah-kulit-singkong-produksi-ipb/>;Diakses pada 29April 2017; 18:50